

Pancasila Sebagai Ideologi Negara: Implementasi Nilai – Nilai dalam Kehidupan Nasional dan Internasional

Ashfiya Nur Atqiya¹, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha², Amelia Fitri Ramadhani³,
Salma Aqila Luluatul Masfufah⁴, Samas Hikam Alhasitsa⁵

^{1,2}, Universitas Sebelas Maret

^{3,4,5} Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Email: ashfiy.anura@gmail.com, am.mustain.n@gmail.com, ameltriaa533@gmail.com,
salmaaqila077@gmail.com, hikamsamas@gmail.com

Abstract. Pancasila is the foundation of the state and national ideology in the life of the nation and state. The function of Pancasila as an ideology, worldview, and state foundation must remain consistent. However, as an open ideology, Pancasila must be able to develop along with progress. The application of Pancasila ideology and Pancasila values can be applied in national and international life. This study produces findings from previous research related to the implementation of Pancasila as the state ideology. The research literature relies on written works, including published and unpublished research results, because this type of research is usually carried out without data searches. This research method uses a qualitative method. This data is collected from reference books, journals, and scientific articles. The main purpose of this journal is to improve the understanding and application of Pancasila values in national and international life. The results of the research are Pancasila as a state ideology which has deep values in it can be implemented in national and international life.

Keywords: Ideology, Pancasila, implementation

Abstrak. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi Pancasila sebagai ideologi, pandangan hidup, dan dasar negara harus tetap konsisten. Namun, sebagai ideologi yang terbuka, Pancasila harus dapat berkembang seiring kemajuan. Penerapan ideologi Pancasila dan nilai pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan nasional dan internasional. Studi ini menghasilkan temuan dari penelitian sebelumnya yang berkaitan implementasi Pancasila sebagai ideologi negara. Kepustakaan penelitian bergantung pada karya tertulis, termasuk hasil penelitian yang sudah maupun yang belum dipublikasikan, karena jenis penelitian ini biasanya dilakukan tanpa pencarian data. Metode penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif. Data ini dikumpulkan dari referensi buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Tujuan utama jurnal ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan nasional maupun internasional. Hasil penelitian adalah Pancasila sebagai ideologi negara yang terdapat nilai – nilai luhur didalamnya dapat diimplementasikan dikehidupan nasional dan internasional.

Kata kunci: Ideologi, Pancasila, Implementasi

1. PENDAHULUAN

Karena masyarakat selalu berubah, Pancasila harus dipelajari secara ilmiah untuk aktualisasinya. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara sudah tidak dapat ditawarkan lagi kepada rakyat Indonesia. M.Mahfud MD. menyatakan bahwa Pancasila, yang disebutkan dalam Pembukaan UU 1945, adalah *modus vivendi* (kesepakatan luhur) bangsa Indonesia. Pancasila sangat sesuai dengan kepentingan yang berbeda di Indonesia saat ini, yang mungkin bertentangan satu sama lain (Anis Ibrahim, 2010).

Pancasila sebagai Ideologi. Kata "idea berasal dari kata bahasa Yunani "eidos", yang berarti "bentuk", dan kata lain, "idein", yang berarti "melihat". Oleh karena itu, "ideologi" secara harafiah berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari konsep atau konsep dasar. "Ide" dan "cita-cita".

Dalam Pembukaan UUD NKRI 1945, alinea 4 Menyebutkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, dengan bunyi "Kedua". Meskipun kata "Pancasila" tidak ditemukan secara eksplisit dalam kalimat terakhir alinea 4, anak kalimat "berdasarkan..." menunjukkan bahwa Pancasila adalah dasar negara, berdasarkan interpretasi sejarah dari sidang pertama BPUPKI, yang dipimpin oleh Kanjeng Raden Tumenggung Radjiman Wedyodiningrat. Republik Indonesia harus sejiwa dan sejalan dengan Pancasila. Dengan kata lain, isi dan tujuan peraturan perundang - undangan RI tidak boleh menyimpang dari jiwa Pancasila. Pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang di dalamnya ada dasar negara Pancasila yang sudah barang tentu menjadi dasar bagi penyelenggaraan negara, Terdapat Sembilan prinsip pokok yang mendasari penyusunan sistem penyelenggaraan Negara Indonesia dalam rumusan undang-undang di masa depan yaitu (Jimly Asshiddiqie, 2005, 66):

Tujuan Sosial Percaya bahwa Pancasila penting untuk saat ini dan masa depan karena fakta bahwa Pancasila tidak lagi digunakan untuk kepentingan kekuasaan tetapi sebagai falsafah hidup dan cermin impian bersama seluruh anak bangsa tentang hidup berbangsa dan bernegara. Akibatnya, pendapat ini jelas salah. (Yudi Latif, 2011).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Pustaka. Penelitian ini meninjau literatur sebelumnya tentang judul jurnal tersebut dalam konteks penelitian kepustakaan, yang merupakan jenis penelitian kualitatif yang biasanya dilakukan melakukan pencarian data tidak langsung Oleh karena itu, kepustakaan penelitian bergantung pada karya tertulis, termasuk hasil penelitian yang sudah maupun yang belum dipublikasikan, serta sumber informasi lainnya.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam upaya penguatan karakter bangsa ini membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya aktual dan kontekstual. Selain itu, Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada keterkaitan masalah yang dikaji dengan sejumlah data primer dari subjek penelitian yang tidak dapat dipisahkan dari latar alamiahnya, tanpa ada rekayasa serta

pengaruh dari luar. Atas dasar itulah maka peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Creswell (1998 : 15).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tantangan Pancasila sebagai Ideologi Negara

Meskipun telah melakukan reformasi selama sepuluh tahun, Indonesia kini menghadapi banyak masalah. Kondisi nasional Indonesia saat ini adalah sebagai berikut, sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional:

a. Sebagian besar orang tidak menggunakan nilai-nilai budaya dan agama negara mereka sebagai dasar etika nasional dan internasional mereka. Hal itu juga menyebabkan ketidakadilan, pelanggaran hukum, dan pelanggaran hak asasi manusia.

b. Konflik suku, kebudayaan, dan agama menyebabkan konflik sosial budaya yang tidak dikelola secara adil dan adil oleh masyarakat dan pemerintah.

c. Prinsip keadilan persamaan hak warga negara di depan hukum telah dilaksanakan karena penegakan hukum telah diselewengkan. Perilaku seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, bersama dengan kurangnya perhatian terhadap usaha kecil dan menengah, menyebabkan peningkatan kemiskinan dan kemiskinan, penurunan sosial ekonomi, dan krisis ekonomi yang berkepanjangan.

d. Kegagalan sistem politik menyebabkan pemimpin yang amanah, teladan, dan pendukung kepentingan masyarakat.

e. Peralihan kekuasaan yang sering menyebabkan gangguan, pembunuhan, dan balas dendam.

f. Karena demokrasi masih ada, masyarakat tidak dapat menyuarakan pendapat mereka tentang kebijakan pemerintah, yang mengakibatkan pergolakan politik, yang menghasilkan gerakan masyarakat yang menuntut kebebasan, kesetaraan, dan keadilan.

g. Karena tidak adanya pengawasan internal dari pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat, serta tidak adanya pengawasan dari masyarakat dan media masa sebelumnya, kekuasaan yang berkuasa telah menciptakan transparansi dan transparansi. Pemerintah tidak bertanggung jawab menjalankan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Akibatnya, masyarakat kurang percaya pada penyelenggara negara.

h. Globalisasi dalam hal politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat menguntungkan Indonesia, namun juga dapat merugikan.

Saya tidak mengerti, tidak menyadari, atau tidak percaya bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila dan dokumen Pancasila sangat penting untuk diterapkan secara menyeluruh dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Implementasi Pancasila sebagai Ideologi Nasional

Pancasila adalah sistem filosofis yang tidak tertutup. Sila kelima Pancasila universal. Pancasila mempunyai posisi khusus di Indonesia sebagai ideologi bangsa, dasar negara, dan pedoman bagi bangsa Indonesia dalam segala aspek kehidupannya, terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memiliki nilai-nilai yang jelas yang dapat digunakan sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuannya adalah untuk menjadikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila lebih mudah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Untuk membentuk masyarakat yang memiliki nilai dan sikap yang selaras dengan Pancasila, setiap negara dan bangsa harus mengamalkan nilai-nilai yang digariskan dalam Ideologi Pancasila. Tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dicapai dengan cara demikian. Keadaan masyarakat Indonesia yang belum memahami Pancasila dan belum terlaksana dengan baik dalam penerapannya, secara kasar dapat digambarkan melalui penjelasan di atas. Dengan demikian, tujuan kehidupan di tingkat nasional dan internasional dapat tercapai. Penjelasan di atas dapat memberikan gambaran singkat tentang betapa buruknya masyarakat Indonesia dalam memahami dan menjalankan Keadaan Pancasila. Tujuan jurnal ini adalah untuk membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan ideologi Pancasila dan bagaimana ia diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan utama dari jurnal ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang Pancasila dan bagaimana kita dapat menerapkannya. Pancasila adalah ideologi bangsa yang berisi nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa, berbangsa, dan bernegara. Tanpa nilai-nilai ini, bangsa Indonesia tidak akan memiliki perspektif, landasan, atau pedoman untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yang memiliki banyak budaya. Pancasila dapat mengintegrasikan berbagai budaya dan tradisi Indonesia. Aspek subyektif dari pentingnya kepribadian Pancasila, dan implementasi nilai-nilai Pancasila semuanya berkontribusi terhadap aktualisasi Pancasila (Eddy, 2018).

Keinginan masyarakat Indonesia harus menjadi titik tolak pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. karena bermula dari keinginan agar nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman bagi masyarakat, bangsa, dan negara (Soeprapto, 2005).

Namun, agar keinginan tersebut muncul di masyarakat, diperlukan upaya keberagaman di segala bidang kehidupan bisa disebabkan oleh masyarakat Indonesia yang majemuk. Dalam masyarakat Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai sumber arah dan tuntutan yang harus diikuti dan dilaksanakan. Besar kemungkinan akan terjadi perpecahan jika hal ini tidak bisa ditindaklanjuti. Ada upaya dialog transformasional antar warga untuk mengantisipasi hal tersebut (Gultom, 2010).

Sesuai sila kelima Pancasila (Aminullah, 2020), warga negara dapat menjaga hubungan dengan negara sebagai satu kesatuan dalam meningkatkan kualitas hidup Indonesia dengan mengedepankan dialog transformatif. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila merupakan salah satu cara menjaga keutuhan negara Indonesia. Akan ada berbagai permasalahan yang dapat merugikan Anda dan orang lain jika Anda tidak menanamkan dan menerapkan nilai-nilai tersebut. Sayangnya pengamalan nilai-nilai Pancasila mulai memudar, dan Pancasila kini hanya sekedar formalitas bagi bangsa dan lambang negara. Dalam masyarakat Indonesia, Pancasila sudah tidak lagi menjadi kesadaran kolektif. Munculnya sejumlah isu, antara lain radikalisme, penyalahgunaan narkoba, terkikisnya nilai-nilai kemanusiaan, SARA (suku, ras, dan antargolongan), pelecehan, dan terkikisnya toleransi hak asasi manusia. Faktanya, penegakan hukum di Indonesia cenderung blak-blakan ke atas dan tajam ke bawah. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum sepenuhnya memahami norma dan nilai Pancasila. Agar masyarakat Indonesia dapat menggunakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, diperlukan upaya dari masyarakat Indonesia.

Sebagai landasan untuk mewujudkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Pancasila, diperlukan pedoman yang lugas dan dapat dicapai. Berikut rinciannya:

Prinsip pertama mencakup nilai-nilai seperti ketuhanan, agama, keadilan, dan negara. Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Mahakuasa. Karena agama mengatur segalanya, masyarakat Indonesia harus berpegang pada norma agama dalam berpikir dan bertindak. Sila pertama Pancasila dapat dipraktikkan dengan berbagai cara, antara lain bersikap toleran terhadap satu sama lain, menghargai perbedaan, menjaga kerukunan antar umat yang berbeda keyakinan, dan tidak berusaha mengubah agama atau kepercayaan orang lain. Meskipun setiap orang berbeda dalam segala hal, menghormati

satu sama lain adalah hal yang penting. Untuk mencapai hal ini, Anda harus memperoleh dan mempraktikkan toleransi, rasa hormat, dan kebaikan. Sebagai landasan dalam mengamalkan nilai dan norma Pancasila diperlukan pedoman yang lugas dan aplikatif. Spesifiknya adalah sebagai berikut:

1. Sila pertama meliputi nilai-nilai ketuhanan, agama, dan kenegaraan serta keadilan. Karena agama mengatur segalanya, maka mentalitas dan norma sosial masyarakat Indonesia harus dikaitkan dengan norma agama. Menghargai perbedaan, khususnya perbedaan keyakinan antar masyarakat, saling bertoleransi, menjaga kerukunan antar masyarakat yang berbeda keyakinan, dan tidak memaksakan agama atau keyakinan kepada orang lain merupakan cara untuk mengamalkan sila pertama Pancasila.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab menjunjung tinggi nilai saling menghormati meskipun setiap orang berbeda dalam segala hal. Oleh karena itu, Anda perlu memperoleh dan menerapkan rasa toleransi terhadap orang lain, memperlakukan satu sama lain dengan hormat, dan selalu memperlakukan semua orang dengan adil. Secara ringkas dapat pula dipahami sebagai sikap saling menghormati harkat dan martabat manusia sebagai makhluk anugerah Tuhan yang mempunyai hak, keistimewaan, dan tanggung jawab yang sama. Masyarakat diharapkan lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dibandingkan kepentingan individu atau kelompok sesuai dengan sila ketiga.

3. Menjadi orang Indonesia berarti menyerahkan nyawa cinta tanah air demi kebaikan bangsa dan negara. Menggabungkan semua perbedaan menjadi satu nilai menghasilkan nilai ketiga.

4. Kebijakan dalam representasi dan diskusi demokrasi masyarakat Indonesia dipimpin oleh kebijaksanaan dan kesepakatan. Sebelum sampai pada suatu keputusan yang menguntungkan semua orang, akan dilakukan musyawarah mufakat. Aksi ini dilatarbelakangi oleh semangat kekeluargaan khas Indonesia. Menghargai, mengapresiasi, dan menghormati pihak lain tanpa diskriminasi merupakan salah satu cara untuk menerapkan hal tersebut, seperti selalu bersikap jujur saat pemilu dan tidak saling menghina.

5. Keadilan Sosial Bagi Setiap Orang Indonesia Perlu adanya sikap adil terhadap setiap orang dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban guna mencapai keadilan sosial. Budaya luhur masyarakat yang terdapat di seluruh nusantara

memunculkan nilai-nilai Pancasila yang mendasar, mutlak, universal, dan abadi (Wahyu, W 2015).

Pada hakikatnya, sebelum berdirinya Negara, nilai-nilai Pancasila didasarkan pada budaya fragmentasi yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, untuk melestarikan eksistensi

Indonesia, nilai-nilai Pancasila harus diimplementasikan dalam bidang-bidang sebagai berikut:

1. Bidang Politik

Perwujudan kehidupan politik diperlukan demi harkat dan martabat manusia, karena bidang politik manusia merupakan bagian dari subyek negara. Asas Pancasila harus menjadi landasan pembangunan politik bangsa guna mengakhiri partai politik dan oknum-oknum yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Di Indonesia, masih banyak persoalan politik, seperti suap anggota dan korupsi.

2. Sektor Perekonomian

Sumber daya perekonomian suatu masyarakat dapat menentukan keberhasilan suatu bangsa (Huriah, R. 2013). Kebijakan perekonomian Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Keputusan perekonomian pemerintah Indonesia secara moral didasarkan pada sila pertama, Tuhan Yang Maha Esa. Persaingan bebas biasanya merupakan hasil dari pertumbuhan ekonomi, dan etika kemanusiaan jarang diperhitungkan. Sistem perekonomian Indonesia didasarkan pada kekerabatan untuk kemanusiaan dan kesejahteraan bersama. Dalam bidang ekonomi, Pancasila dapat dengan mudah diwujudkan dalam aktivitas sehari-hari seperti ikut aktif dalam koperasi, membeli dan memanfaatkan produk lokal, serta membantu penjualan barang kepada UMKM Indonesia.

3. Bidang Pertahanan dan Keamanan

Upaya yang dilakukan untuk melindungi kedaulatan, kesatuan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman dan gangguan baik dari dalam maupun luar negeri disebut dengan pertahanan. Bentuk bela negara adalah konsep hak asasi manusia yang demokratis. Sila ketiga nilai-nilai persatuan Indonesia menyatakan bahwa setiap warga negara wajib melindungi dan membela negara. Untuk berkontribusi dalam pertahanan dan pemeliharaan keamanan negara, setiap orang harus merasa bertanggung jawab. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah melalui tindakan yang berkaitan dengan pertahanan negara. Bangsa Indonesia wajib mempertahankan dan menegakkan kemerdekaannya sesuai dengan Pembukaan UUD

1945. Seluruh warga negara Indonesia dan darah Indonesia terkena dampaknya. Penentangan terhadap segala bentuk kolonialisme demi mendukung politik bebas merupakan pertahanan nasional.

4. Bidang Sosial Budaya

Karena Indonesia adalah negara yang luas dengan banyak bahasa, budaya, dan adat istiadat, maka pembangunan sosial budaya harus mengangkat nilai-nilai Pancasila yang bersifat humanis. Artinya Pancasila dilandasi oleh nilai-nilai yang bersumber pada harkat dan martabat sebagai makhluk sosial manusia.

5. Bidang Pendidikan

Penerapan sila Pancasila dapat dilakukan kapan saja dalam konteks pendidikan atau misalnya mengadakan upacara bendera pada hari-hari besar seperti Hari Pahlawan, Hari Kemerdekaan, dan Sumpah Pemuda.

C. Perbandingan Ideologi Pancasila Dengan Negara Lain

Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi yang dianut negara lain dapat dilihat dari prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Pancasila dan membandingkannya dengan ideologi yang berkembang di negara-negara lain seperti demokrasi liberal, sosialisme, dan komunism. (Hakim, B, 2016)

1. Pancasila vs Demokrasi Liberal (Amerika Serikat)

Pancasila: Ideologi Indonesia ini terdiri dari lima sila yang mencakup:
Ketuhanan yang Maha Esa (pengakuan atas Tuhan dan penghormatan terhadap agama).
Kemanusiaan yang adil dan beradab (prinsip keadilan dan hak asasi manusia).
Persatuan Indonesia (penekanan pada kesatuan bangsa).

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (mengutamakan sistem demokrasi berbasis musyawarah).
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (pemerataan kesejahteraan sosial).

Demokrasi Liberal (Amerika Serikat): Ideologi ini menekankan pada kebebasan individu, hak asasi manusia, serta sistem pemerintahan yang dipilih melalui pemilu bebas dan adil. Negara menjamin kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan dalam kehidupan pribadi.

Perbandingan: kedua ideologi menghormati hak asasi manusia, tetapi Pancasila lebih mengutamakan nilai-nilai moral dan sosial, sementara demokrasi liberal lebih menekankan kebebasan individu. Pancasila menggunakan musyawarah untuk mencapai

keputusan, sedangkan demokrasi liberal lebih mengandalkan sistem voting atau pemungutan suara berdasarkan mayoritas.

2. Pancasila vs Sosialisme (Uni Soviet atau China)

Pancasila: Meskipun menekankan pada keadilan sosial (sila kelima), Pancasila tidak mengharuskan kepemilikan negara atas alat produksi dan mengakomodasi pluralitas agama dan budaya.

Sosialisme (Uni Soviet atau China): Ideologi ini berfokus pada penghapusan kelas sosial dan kepemilikan negara atas alat produksi. Sosialisme bertujuan menciptakan distribusi kekayaan yang merata.

Perbandingan: sosialisme lebih menekankan kontrol negara atas ekonomi dan pembagian kekayaan, sedangkan Pancasila mengutamakan keseimbangan antara hak individu dan keadilan sosial. Pancasila memberi ruang bagi sistem ekonomi pasar, sementara sosialisme mengatur perekonomian agar lebih terpusat dan dikelola oleh negara.

3. Pancasila vs Komunisme (China atau Kuba)

Pancasila: Pancasila mengakui adanya agama (Sila pertama) dan mendorong pluralisme, berbeda dengan komunisme yang lebih menekankan pada materialisme dialektik dan atheisme. Pancasila juga mendukung keberagaman masyarakat.

Komunisme: Ideologi ini menekankan penghapusan kelas sosial, kepemilikan bersama atas alat produksi, dan pembentukan masyarakat tanpa kelas.

Perbandingan: pancasila lebih mengedepankan nilai-nilai kebangsaan dan penghargaan terhadap agama, sementara komunisme mengutamakan penghapusan kelas sosial dan pencapaian masyarakat yang egaliter. Pancasila tidak menentang kepemilikan pribadi, sementara komunisme berusaha menghapuskan kepemilikan pribadi terhadap alat produksi. (Hayek, F. A. , 1944)

4. Pancasila vs Islamisme (Negara Islam)

Pancasila: Pancasila memberikan ruang untuk pluralitas agama dan menekankan toleransi antar umat beragama, sementara Islamisme berusaha mengimplementasikan hukum syariat Islam sebagai dasar negara dan kehidupan sosial.

Islamisme: Ideologi ini mendasarkan sistem negara dan masyarakat pada hukum Islam dan menjadikan prinsip-prinsip agama sebagai pedoman utama dalam pemerintahan.

Perbandingan: pancasila mengakui keberagaman agama dan menghargai hak individu untuk memilih agama, sementara Islamisme berusaha menerapkan hukum Islam secara menyeluruh dalam kehidupan negara. Pancasila lebih inklusif, sedangkan Islamisme lebih menekankan pada penerapan hukum agama sebagai landasan negara. (Esposito, J. L, 1999)

4. KESIMPULAN

Sebagai Ideologi Negara Indonesia, Pancasila menjadi pedoman utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seluruh warga negara Indonesia, apapun suku, ras, dan agamanya berpedoman pada Pancasila.

Ada tiga nilai dalam Ideologi Pancasila: nilai fundamental, nilai instrumental, dan nilai praktis. Selain itu, setiap sila Pancasila didasarkan pada seperangkat nilai-nilai seperti demokrasi, keadilan, kemanusiaan, dan ketuhanan. Namun, radikalisme dan intoleransi merupakan tantangan dan ancaman baru yang ditimbulkan oleh globalisasi. Oleh karena itu, aktualisasi nilai-nilai Pancasila dianggap sebagai solusi potensial atas permasalahan tersebut.

Pengamalan penerapan prinsip dan rutinitas dalam kehidupan sehari-hari itulah definisi pancasila. Bangsa Indonesia diharapkan mampu mengamalkan sila Pancasila. Namun, penerimaan terhadap prinsip-prinsip pancasila mulai memudar dan praktiknya kini hanya sekedar symbol.

DAFTAR PUSTAKA

- Muslimin, H. (2016). Tantangan terhadap pancasila sebagai ideologi dan dasar negara pasca reformasi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(1), 30-38.
- Gultom, A. F. (2010). Dialog Transformatif Agama Dan Kekerasan. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*.4(2).279-289.
- Aminullah, A. (2023). Pancasila Sebagai Ideologi Dan Dasar Negara Serta Tantangan Dan Solusinya. *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 8(2), 408-423.
- Aminullah, R., & Umam, M. (2020). Pancasila sebagai Wawasan Nusantara. *Jurnal Al-Allam*, 1(1), 1-16. <https://doi.org/10.22146/jkn.22980>.
- Eddy, I. W. T. (2018). Aktualisasi Nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa Bernegara. *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan*, 1(18), 116-123.

- Ibrahim, A. (2010). Perspektif Futuristik Pancasila Sebagai Asas/Ideologi Dalam UU Keormasan. *Jurnal Konstitusi*, 3 (2), 115063.
- Sidabutar, Y. S., Calista, A., HM, I. P., Faris, M., & Azzahra, D. P. (2023). TANTANGAN DAN PELUANG PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA DI ERA DIGITAL PADA KEHIDUPAN MAHASISWA. *Jejak Pembelajaran: Jurnal Pengembangan Pendidikan*, 7(4).
- Soeprapto, S. (2016). Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Ber Masyarakat Berbangsa Dan Bernegara. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 10(2), 17-28.
- Asshidiqie, Jimly, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisone Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Kaelan, 2016, *Pendidikan Pancasila*, Perverbit Paradigma, Yogyakarta.
- Latif, Yudi, 2011 *Negara Paripurna, Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Nurgiansah, T. H. (2022). Meningkatkan Minat Belajar Siswa Dengan Media Pembelajaran Konvensional Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(3), 1529-1534. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i3.4902>.
- Hakim, B. (2016). *Ideologi Politik di Dunia Modern*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Hayek, F. A. (1944). *The Road to Serfdom*. Chicago: University of Chicago Press.
- Esposito, J. L. (1999). The Islamic State: A Political Ideology. *Journal of Political Science*, 43(4), 455-473.
- Wahyu, W. (2015). Pengimplemantasian Pancasila Sebahai Dasar Negara. *Junal Pendidikan Penelitian Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6.(1).